

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan oleh sebab itu Indonesia disebut Nusantara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bersaing. Kedua faktor tersebut menjadi modal utama perekonomian Indonesia. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik), sektor jasa termasuk sektor yang memberikan sumbangan besar pada perekonomian Indonesia. Sektor jasa juga memiliki peran penting dalam pemanfaatan kedua faktor tersebut.

Sebagai langkah awal untuk menunjang perkembangan sektor jasa, Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam GATS (*General Agreement Trade in Services*), perjanjian yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan jasa di dunia dan tercapainya suatu integritas ekonomi. Namun demikian, ternyata kebijakan ini masih terdapat kendala, terutama kondisi dalam negeri Indonesia.

#### A. Tujuan dan Manfaat Penulisan

##### 1. Tujuan

- Memberi rumusan masalah yang relevan untuk mencari jawaban dan penjelasan yang disusun dalam perumusan masalah, hipotesa dibuktikan dengan data dan fakta serta sebagai manifestasi penerapan teori-teori yang pernah penulis dapat selama di bangku kuliah

- Mengetahui pengaruh GATS dan memberikan gambaran mengenai perkembangan jasa konstruksi Indonesia sejak tahun 2005-2010.
- Secara khusus, penulisan ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 2. Manfaat

- Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional tentang perkembangan jasa konstruksi di Indonesia.
- Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi semua kalangan masyarakat khususnya penyedia jasa konstruksi agar dapat meningkatkan kompetensi dan pemerintah agar dapat meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap jasa konstruksi Indonesia baik berwujud kebijakan maupun tindakan nyata.

## B. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin meningkat baik jenis, kualitas maupun bentuknya. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi manusia, dan harus terpenuhi seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal serta rumah. Kebutuhan yang diperlukan setelah

kebutuhan primer terpenuhi disebut kebutuhan sekunder yaitu seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal yang nyaman, serta pakaian yang bagus. Kebutuhan sekunder pada dasarnya merupakan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan lainnya yang bersifat mewah dan berlebihan, dan tidak setiap manusia dapat memenuhinya disebut kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan seperti mobil mewah, perhiasan, komputer, telepon, parabola, televisi dan lain sebagainya. Kebutuhan sangatlah penting yang mana diperlukan dan harus dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan peradaban serta kemajuan ilmu dan teknologi, apabila satu kebutuhan telah terpenuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Maka dari itu timbul masalah ekonomi. Pada hakekatnya permasalahan ekonomi di masyarakat adalah sama, hanya pemecahan masalahnya yang biasanya berbeda, yaitu tergantung dari sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara.

Masalah ekonomi muncul yang disebabkan karena tingkat kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan banyak serta harus dipenuhi sedangkan pemuas kebutuhan jumlahnya sangatlah terbatas. Kebutuhan hidup tersebut, baik berupa barang maupun jasa, semua harus di produksi oleh sebagian dari masyarakat untuk meningkatkan daya guna barang maupun jasa tersebut, kemudian juga diadakan hubungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing baik antar individu maupun kelompok. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang sangat besar, dilakukan produksi dan pendistribusian serta pertukaran barang dan jasa secara meluas untuk kepentingan masing-masing baik

itu antar individu, antar kelompok bahkan antar negara. Bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan hubungan tukar menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya, baik secara kolektif ataupun individu-individu dengan maksud untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta juga untuk kegiatan transfer teknologi modern. Bagi suatu negara, perdagangan internasional dapat dijadikan sarana untuk mencapai berbagai tujuan yang dapat meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) yaitu nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.<sup>1</sup> PDB juga menjadi salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Meningkatnya PDB suatu negara dapat menciptakan kemakmuran suatu negara seperti menunjang pembangunan nasional di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta turut mempercepat terjadinya industrialisasi, globalisasi, perkembangan transportasi serta tumbuhnya perusahaan multinasional.

Perdagangan internasional dilakukan agar setiap negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya serta memenuhi kepentingan negara-negara di dunia. Perdagangan yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur dua negara atau lebih ini dapat memberikan keuntungan. Keuntungan di sini tidak hanya terfokus pada keuntungan secara finansial saja tetapi juga bisa mengarah pada non

---

<sup>1</sup>Wikipedia, "Produk Domestik Bruto", (Diakses pada 28 Desember 2010), [http://id.wikipedia.org/wiki/Produk\\_domestik\\_bruto](http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto)

finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha dan keuntungan strategis lainnya. Maka dari itu hampir semua negara berminat dan tertarik melakukan perdagangan internasional, hal ini disebabkan karena kebutuhan barang dan jasa dalam negeri harus terpenuhi, negara pun menginginkan keuntungan dan peningkatan pendapatan sementara terdapat perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah tiap sumber-sumber daya. Perbedaan-perbedaan sumber daya misalnya sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk, sistem komunikasi serta sarana transportasi yang dapat menyebabkan perbedaan hasil produksi dan keterbatasan produksi. Disamping itu dengan perdagangan ini tiap negara dapat menjual produk akibat adanya kelebihan produk dalam negeri yang dikarenakan kesamaan selera terhadap suatu barang serta keinginan membuka kerja sama, baik hubungan politik dan permintaan dari negara lain.

Perdagangan internasional salah satunya diatur dalam bentuk perjanjian internasional sebagai kerangka hukum yang akan digunakan sebagai aturan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perdagangan internasional. Sehingga perjanjian internasional merupakan suatu hukum yang melandasi suatu perdagangan internasional yang akan menyebabkan suatu ikatan yang mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional adalah WTO (*World Trade Organization*) yaitu institusi yang berperan sebagai organisasi perdagangan dunia yang bertugas untuk mendorong

perdagangan bebas, mengatur serta memudahkan segala bentuk perdagangan yang terjadi pada negara-negara anggota. Salah satu bagian dari WTO adalah perjanjian mengenai beberapa isu yaitu : Barang atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), Hak atas kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlements* dan Jasa atau *General Agreement Trade in Service* (GATS).<sup>2</sup> Salah satu isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah mengenai perdagangan jasa yang merupakan bagian dari ekonomi dunia yang tumbuh dengan cepat dan menghasilkan lebih dari 60% keluaran dunia, dimana perdagangan sektor jasa diatur dalam perjanjian GATS.<sup>3</sup>

GATS adalah salah satu perjanjian di bawah WTO suatu perjanjian umum untuk semua sektor jasa-jasa. GATS mulai diberlakukan sejak 1 januari 1995. Dalam hal ini GATS merupakan suatu perjanjian dan aturan – aturan sedangkan WTO adalah sebuah institusi yang mengatur dan mengawasi segala bentuk kesepakatan kerjasama perdagangannya. GATS merupakan salah satu perjanjian yang dihasilkan pada putaran perundingan Uruguay. Tujuannya adalah memperluas liberalisasi pada sektor jasa di negara-negara anggota untuk meningkatkan perdagangan jasa di dunia dan tercapainya suatu integritas ekonomi. Hal-hal yang diatur dalam GATS meliputi berbagai aspek perdagangan jasa seperti jasa profesional, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa perbankan dan segala bentuk bisnis jasa yang terdapat di negara-negara anggota.

---

<sup>2</sup> Departemen Pertanian, "World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia", (Diakses pada 28 Desember 2010), <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>

<sup>3</sup> Ulin Ihamtani, *WTO Day Berakhir Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta : INSISTPress, 2005

Setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk di liberalisasi dan melakukan kerjasama dengan menyusun mekanisme dan sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing. GATS mengharuskan negara-negara anggota untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan jasa demi tercapainya suatu intergrasi ekonomi.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1994, Indonesiatelah mengesahkan keikutsertaannya dalam WTO sertamenandatangani salah satu perjanjiannya yaitu GATS, yang mengatur mengenai perdagangan jasa internasional. Maka dengan itu Indonesia memiliki peluang dalam menguasai pasar konstruksi domestik dan internasional yang semakin terbuka dan luas dengan keikutsertaannya dalam GATS.

Di Indonesia sektor jasa termasuk dalam salah satu sektor yang menyumbang paling besar terhadap PDB. Khususnya pada sektor jasa konstruksi tahun 2009, konstruksi Indonesia terdapat lebih kurang 145.260 Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK).<sup>4</sup> BUJK Indonesia memiliki tenaga ahli yang cukup banyak, prospek tersebut dapat mendatangkan investasi yang besar jika Indonesia mampu mengembangkan potensi tersebut. Sektor konstruksi telah menjadi salah satu potensi utama pembangunan perekonomian nasional. Menurut data yang dikutip dari BPS menerangkan bahwa sumbangan sektor konstruksi terhadap PDB pada tahun 2005 sudah menembus 6,35%. Dalam penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi memberikan kontribusi pada tahun 2006 mencapai 4,37 juta jiwa, terdiri atas 4,24 juta jiwa pekerja pria dan 124.932 jiwa pekerja wanita. Secara

---

<sup>4</sup>Badan Pembinaan Konstruksi, "Sosialisasi PP 24 2010", (Diakses pada 28 Desember 2010), <http://bksdm.pu.go.id/index.php?menu=10&kd=408>

total, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi mampu menyerap sebesar 4,60% dari total angkatan kerja pada tahun itu yang mencapai 95,17 juta jiwa. Berdasarkan lapangan usaha, sektor konstruksi memberi kontribusi pada tahun 2007 sebesar 7,7%.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai jasa konstruksi yang tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang peran pemerintah terhadap usaha jasa konstruksi yang memiliki wewenang dalam pembinaan jasa konstruksi. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran bagi masyarakat jasa konstruksi nasional untuk dapat meningkatkan kompetensi para pengelola sektor jasa, dengan kebijakan ataupun tindakan nyata yang dapat mengembangkan potensi jasa konstruksi agar mampu mendorong pelaku jasa konstruksi Indonesia dalam bersaing menguasai pasar dalam negeri serta pasar internasional dengan dibukanya pasar bebas.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena dalam faktanya setelah keikutsertaan Indonesia dalam meliberalisasi sektor jasa konstruksi pada GATS ternyata masih terdapat beberapa kendala pada kebijakan yang mendukung perkembangan jasa konstruksi di Indonesia, yaitu mengenai dukungan serta perlindungan usaha terhadap mayoritas pelaku usaha jasa konstruksi yaitu usaha kecil, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas jasa konstruksi baik untuk kepentingannya sendiri ataupun manfaatnya bagi kehidupan sosial. Terbukti dengan adanya sekitar 5,7 Juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia 60% diantaranya adalah tenaga kurang terampil,

---

<sup>5</sup>Kabar Bisnis.com, "Potensi pasar makin meningkat jasa konstruksi kian memikat", (diakses pada 28 Desember 2010), <http://www.kabarbisnis.com/makro/konstruksi/287582->

Potensi pasar makin meningkat, bisnis jasa konstruksi kian memikat.html



tenaga terampil, dan sekitar 10% baru merupakan tenaga ahli. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih perlu ditingkatkan, apalagi untuk mempersiapkan persaingan dengan pelaku jasa konstruksi asing baik di pasar lokal maupun di pasar internasional.<sup>6</sup>

Menurut Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, *perlu adanya perbaikan terhadap regulasi-regulasi, terutama optimalisasi regulasi serta reregulasi didorong untuk memacu dunia jasa konstruksi Indonesia.*<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai dampak keikutsertaan Indonesia dalam GATS terhadap perkembangan jasa konstruksi di Indonesia, baik dari segi dukungan pemerintah maupun masyarakat jasa konstruksinya sendiri.

### **C. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

**“Bagaimana dampak keikutsertaan Indonesia dalam GATS terhadap perkembangan jasa konstruksi di Indonesia selama tahun 2005-2010 ?”**

---

<sup>6</sup> Badan Pembinaan Konstruksi, “60 Persen Tenaga Konstruksi Harus Terampil”, (Diakses pada 28 Desember 2010), <http://bpksdm.pu.go.id/?menu=10&kd=446>

<sup>7</sup> Iwan Kartisyan, *Wajah Jasa Konstruksi Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih teori konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk membantu menjelaskan permasalahan diatas penulis menggunakan Konsep Organisasi Internasional, yaitu sebagai berikut :

Organisasi internasional adalah suatu proses. Organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.<sup>8</sup>

Organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.<sup>9</sup>

Organisasi internasional tidak dapat dipisahkan oleh suatu perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan seluruh organisasi internasional didirikan atas perjanjian para pihak yang dalam konteks ini negara sebagai anggotanya.

Perjanjian internasional dibuat oleh antarnegara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional apakah dirumuskan dalam satu, dua, atau lebih instrumen untuk apapun tujuannya. Setelah ada kesepakatan dalam butir-butir perjanjian internasional selanjutnya akan dirumuskan dalam konstitusi atau AD/ART organisasi internasional yang mengikat para pihak sebagai anggota organisasi tersebut.<sup>10</sup>

Unsur-unsur dari organisasi internasional mencakup tiga hal yaitu pertama, adanya keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama. Kedua, adanya

<sup>8</sup> Ade Maman Suberman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional*, Jakarta :

pertemuan-pertemuan secara berkala. Ketiga adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional.<sup>11</sup>

Setiap organisasi memiliki tujuan. Tujuan dicerminkan oleh sasaran-sasaran yang dilakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tiga bidang utama dalam tujuan organisasi yaitu *profitability* (keuntungan), *growth* (pertumbuhan), dan *survive* (bertahan hidup). Ketiganya harus berjalan berkesinambungan demi kemajuan organisasi.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional ditujukan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

Kepentingan tersebut antara lain, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat.<sup>13</sup>

WTO melalui GATS berperan dalam mengatur dan memberikan kemudahan dalam perdagangan jasa, dengan membuka pasar bebas dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Suryantara, "Definisi dan Manfaat Organisasi", ( Diakses pada 24 Maret 2011), <http://suryantara.wordpress.com/2007/12/08/definisi-dan-manfaat-organisasi/>

<sup>13</sup> Kementerian Luar Negeri RI, "Organisasi Internasional", (Diakses pada 17 Maret 2011), <http://www.depku.go.id/Pages/IEP.aspx?P=OrganisasiInternasional&l=id>

perdagangan jasa di dunia khususnya jasa konstruksi dan tercapainya suatu integritas ekonomi.

Kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS, adalah upaya Indonesia melalui keikutsertaannya dalam organisasi internasional untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, khususnya perkembangan jasa konstruksi dalam mempengaruhi iklim investasi sehingga dapat memacu daya saing di era global. Terutama untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan dan memberikan akses pasar yang lebih luas pada sektor jasa khususnya jasa konstruksi di Indonesia.

#### **E. Hipotesa**

Dari latar belakang, rumusan masalah yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dengan teori yang penulis kemukakan dapat diketahuai bahwa *Dampak keikutsertaan Indonesia pada GATS terhadap perkembangan jasa konstruksi Indonesia selama tahun 2005-2010 :*

1. Menciptakan regulasi tentang penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
2. Membuka peluang investasi pada sektor jasa konstruksi di Indonesia.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor jasa konstruksi di Indonesia.
4. Memacu upaya peningkatan daya saing jasa konstruksi Indonesia di pasar

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dan teknik pengumpulan data, penulis melakukannya dengan teknik kepustakaan (*Library research*), dan dilakukan secara deskriptif, yaitu: suatu penulisan yang terbatas, yang mengungkapkan suatu masalah atau fenomena yang terjadi di negara yang menjadi obyek penelitian.

Dalam penyusunan ini penulis melakukan penelitian selama 3 bulan, dan untuk mencari data dari media massa (Surat kabar, Internet, TV), Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, dan dari proses perkuliahan.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Agar tercapai tujuan penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan penelitian berikut sebagai :

1. Penelitian difokuskan pada perkembangan jasa konstruksi Indonesia pada tahun 2005 – 2010.
2. Pengaruh adanya Perjanjian GATS terhadap hasil perkembangan jasa konstruksi Indonesia di tahun yang sama

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi Lima Bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi tentang penjelasan dari struktur skripsi, yang dimulai dari tujuan dan kegunaan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pikir, hipotesis, metode penelitian, dan jangkauan penelitian. Bab I ini merupakan alur berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini.
- BAB II** : Berisi tentang gambaran umum GATS pada WTO.
- BAB III** : Menjelaskan tentang jasa konstruksi Indonesia.
- BAB IV** : Menjelaskan tentang pengaruh GATS terhadap sektor jasa konstruksi Indonesia tahun 2005-2010.
- BAB V** : Kesimpulan tentang dampak keikutsertaan Indonesia dalam GATS terhadap perkembangan jasa konstruksi Indonesia pada